

KEHADIRAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR DISAMBUT GEMBIRA KENAPA TENAGA DOSEN S 1 ?

GEUNTA - MEULABOH

Kehadiran Universitas Teuku Umar di Meulaboh disambut gembira oleh seluruh masyarakat mulai dari Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Simeulu, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan bahkan sampai ke Singkil. Kita tidak lagi berangan-angan menyekolahkan anak ke Perguruan Tinggi diluar wilayah Barat Selatan karena sepuluh Fakultas ada di dalam UTU yang terletak di Alue Penyereng (Alpen) 14 Km dari kota Meulaboh.

Menurut Grassroots Society Forum (GSF) Abdul Jalil, hendaknya untuk UTU diharapkan jangan dilibatkan Rektor UTU Dekan dan Dosen yang masih berstatus S1 tetapi harus S2 demi menjaga kualitas UTU yang punya nama besar di Barat Selatan.

Apakah dengan merekrut

Dosen bertitel S1 tidak melanggar Undang-Undang No.14 Tentang Guru dan Dosen tahun 2005.

Dikatakan Personalialia yang sekarang melanggar BAB V (Dosen), bagian kesatu (Kualifikasi Kompetensi, Sertifikasi dan Jabatan Akademik). Kemudian Pasal 45 Pasal 76 seyogyanya S1

mereka mengajar pada SMA / MA, SLTP / MTs, SD / MI dan jika memang sangat dibutuhkan tenaga S1 menurut Abdul Jalil dari GSF harus disekolahkan terlebih dahulu.

Kita tidak menghambat tetapi demi UTU yang berkualitas nantinya sehingga jebolan dari Universitas Teuku Umar setara dengan Universitas lainnya.

Tenaga-tenaga Dosen UTU terdiri dari Pegawai Negeri/PNS di jajaran Pemerintah Daerah kiranya dinonaktifkan dahulu dari jabatan yang diembangkannya sesuai Undang-Undang No.12 tahun 2003, Undang-Undang No.20 Tahun 2001, Undang-Undang

No.30 Tahun 2002.

Pejabat negara kata Abdul Jalil, tidak boleh menggunakan dana APBD atau tumpang tindih tunjangan dan jabatan. Dikhawatirkan menurut Abdul Jalil UTU berjalan ditempat, kekecewaan masyarakat nantinya tidak berkembang, namun hal ini tidak kita harapkan bagi semua pihak semoga UTU berjalan baik.

Pendapat - pendapat yang intelektual mengatakan bahwa UTU belum Negeri, untuk menuju kenegerian tidak gampang.

Sebuah Fakultas setidaknya lima kali Wisuda harus ditempuh terlebih dahulu kemudian baru dapat dine-

gerikan.

Jadi tidaklah salah tenaga-tenaganya diambil dari PNS Pemerintah Daerah, katanya. Kalau UTU sudah negeri baru tidak dibenarkan PNS ganda status tugasnya.

Lebih jauh digambarkan oleh intelektual yang tak mau disebutkan namanya bahwa marilah kita berpikir yang jernih untuk menuju kedepan dan kritikan-kritikan dari berbagai pengamat kita jadikan tonggak untuk memperkuat jati diri UTU kedepan dan perlu pembenahan-pembenahan demi tercapainya harapan masyarakat Aceh Barat Selatan dari Gurutee sampai ke Singkil, harapnya.(G-KDI)